

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)

Oleh: Dewi Nurmalasari, Endang Irawan Supriyadi

E-mail: dewin960@gmail.com, endangirawan.ei@gmail.com

Abstrak

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui APBD Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Cigondewah Hilir menjadi salah satu desa yang menerima manfaat Dana Desa tersebut. Sejak digulirkannya pada tahun 2015 hingga saat ini, Dana Desa memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, demikian juga pada desa Cigondewah Hilir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir kecamatan Margaasih kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir sudah berjalan efektif, dilihat dari 3 (tiga) indikator pengukuran efektivitas dari Duncan yang dikutip dalam Steers (2005:64) yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi dengan hasil capaian desa Cigondewah Hilir termasuk desa dengan Kategori Maju. Sementara hambatan dari pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, memiliki 2 (dua) faktor yaitu sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang belum merata.

Kata kunci: *Dana Desa, efektivitas, pemberdayaan masyarakat*

Abstract

The Village Fund is a policy rolled by the central government to the regional government through the Regency/City APBD which is prioritized for the implementation of village community development and empowerment. Cigondewah Hilir is one of the villages that receives the benefits of the Village Fund. Since its launching in 2015 until now, the Village Fund has made a major contribution to community development and empowerment, as well as Cigondewah Hilir village. The purpose of this study was to determine the effectiveness of village fund management in community empowerment in Cigondewah Hilir village, Margaasih district, Bandung regency. The research method used is a descriptive qualitative approach with the type of case study research. The results of the study reveal that Village Fund management in community empowerment in Cigondewah Hilir village has been effective, seen from the 3 (three) indicators of measuring the effectiveness of Duncan quoted in Steers (2005: 64), namely goal achievement, integration and adaptation with the results of the results. Cigondewah Hilir village is included in the Advanced Category, while the obstacles to Village Fund management in community empowerment have 2 (two) factors, namely human resources and uneven levels of education.

Keywords: *Community empowerment, effectiveness, Village Fund*

Pendahuluan

Dana Desa yang bersumber dari APBN ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk diprioritaskan ke dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Supriyadi & Asih, 2019). Salah satu tujuan dari adanya Dana Desa adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta pananggulangan kemiskinan.

Desa Cigondewah Hilir merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Margaasih kabupaten Bandung. Sebelum adanya Dana Desa, Cigondewah Hilir menjadi desa tertinggal terlihat dari keadaan lingkungan yang kumuh dan tidak terawat, namun dibalik itu, desa Cigondewah Hilir rata-rata masyarakatnya memiliki usaha berupa Home Industri. Hal ini dapat dilihat dari salah satu indikator, yaitu hampir disetiap rumah memiliki mesin jahit yang berfungsi sebagai alat yang mendukung usaha dibidang kain. Sebelumnya desa Cigondewah Hilir termasuk dalam kategori Desa Tertinggal, tingkat perekonomian masyarakatnya tidak merata, walau memiliki kegiatan dalam bidang usaha home industri dalam bidang kain. Peningkatan ekonomi masyarakat tidak terlihat signifikan hal ini disebabkan belum ada upaya dalam pengembangan usaha masyarakat secara masif.

Dengan adanya Dana Desa yang memprioritaskan pada program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan usaha peningkatan ekonomi dan bidang lainnya. Melalui Musyawarah Dusun (Musdus) Kepala Desa menampung aspirasi masyarakat dan menuangkannya ke dalam APBDesa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, Namun dalam perkembangannya, Desa Cigondewah Hilir, dengan adanya Dana Desa belum dapat merubah secara signifikan, salah satunya karena masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dari total penduduk 10.525 jiwa yang menempuh jenjang pendidikan S-1 sederajat hanya 116 jiwa. Berdasarkan uraian di atas

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir kecamatan Margaasih kabupaten Bandung.

Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas

Persepsi tentang efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara ilmiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Selain itu, sebuah efektivitas sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi, bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi, bahkan sampai kepada negarapun kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kesalahan atau yang dilakukan, karena semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang (Makmur 2011:5)

Sementara Efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005: 209) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketergantungan diantara pelaksanaannya

Ukuran Efektivitas menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2005:64) menyatakan ada 3 indikator dalam menentukan sebuah efektivitas, yakni sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagain-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator; yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus.

Integrasi menyangkut proses sosialisasi

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator efektivitas Duncan yang dikutip Richard M. Steers. Alasannya bahwa keseluruhan dari teori tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan yaitu efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Klasifikasi Desa

Klasifikasi Status Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun yang harus diketahui pihak desa yakni, Desa Mandiri atau Desa Madya adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155, Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072, Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989, Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907, Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil

3. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka tidak akan terlepas dari sebuah tujuan. Berikut beberapa tujuan adanya Dana Desa: Meningkatkan pelayanan publik di desa, Mengentaskan kemiskinan, Memajukan perekonomian desa, Mengentaskan kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa ini diharapkan mampu menunjang segala aspek yang dibutuhkan oleh desa serta masyarakat desa pada umumnya. Karena dengan adanya Dana Desa diharapkan desa menjadi mandiri. Maka dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa terangkum dalam pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa merupakan serangkaian kegiatan dan mekanisme dalam mengelola Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri meliputi: penganggaran serta perencanaan Dana Desa, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor No 6 Tahun 2014 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah desa Cigondewah Hilir kecamatan Margaasih kabupaten Bandung. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Pembahasan

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Efektivitas pengelolaan Dana Desa merupakan suatu pengukuran tingkat keberhasilan dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang diprioritaskan salah satunya adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa.

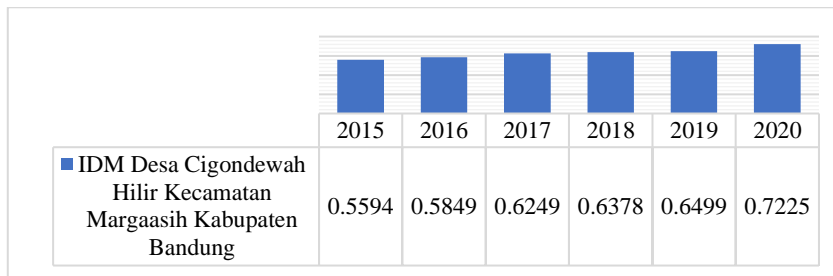
Pada tahun 2018, penerimaan Dana Desa di Desa Cigondewah Hilir sebesar Rp. 1.039.959.000,-, dari penerimaan tahun 2018 ini, 33% diperuntukan ke Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 741.059.700,-, sedangkan penerimaan Dana Desa di tahun 2019 sebesar Rp. 1.269.801.495,- dari penerimaan tahun 2019, 13,8% diperuntukan ke Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 347.000.000,-. Penurunan persentase alokasi dana desa bagi pemberdayaan masyarakat ini dipahami karena di tahun 2018 dengan alokasi anggaran lebih besar memberikan dampak yang baik dalam pemberdayaan masyarakat. Namun demikian tahun 2019 program pemberdayaan masyarakat tetap dilakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah yang diletakkan dalam peraturan desa mengenai skala prioritas dana desa. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa di desa Cigondewah Hilir, penulis menggunakan teori dari Duncan dalam Richard M. Steers (2005:64), sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Indikator pencapaian tujuan diwujudkan dengan proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di desa Cigondewah Hilir dari tahun 2015 – 2020. Tahapan-tahapan yang dilakukan desa Cigondewah Hilir berproses mencapai tujuan dari adanya Dana Desa dengan fokus penelitian dalam pemberdayaan masyarakat, terlihat dari perkembangan yang signifikan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari data Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Tahun 2020



Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Cigondewah Hilir

Dari data di atas dapat diketahui bahwa desa Cigondewah Hilir pada tahun 2015-2016 berturut-turut memiliki skor 0.5594 dan 0.5849 menunjukkan masuk kedalam kategori Desa Tertinggal karena ada pada rentang skor $>0,491$ dan $<0,599$. Sementara pada tahun 2017-2019 desa Cigondewah Hilir berturut-turut memiliki skor 0.6249, 0.6378 dan 0.6499 yang menunjukkan masuk kedalam kategori berkembang karena ada pada rentang skor $>0,599$ dan $<0,707$. Selanjutnya di tahun 2020, desa Cigondewah Hilir masuk kedalam kategori Desa Maju hal ini berdasarkan skor yang diraih mencapai 0.7225

1. Kurun Waktu

Indikator kurun waktu maka dapat dilihat bahwa seluruh program yang telah ditetapkan melalui APBDes terutama bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2. Sasaran

Indikator dari sasaran adanya Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yakni, ketepatan sasaran program pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintahan desa dengan kebermanfaatan program tersebut bagi warga masyarakat, dinilai sudah sesuai dan tepat sasaran, karena dengan diselenggarakannya MUSDUS yang menampung aspirasi dari masyarakat yang pada akhirnya beberapa program pemerintahan desa khususnya dalam pemberdayaan masyarakat sangat bermanfaat bagi warga masyarakat, seperti pelatihan pembuatan keset, program dukungan penanaman modal berupa

gerobak dagangan dan KWT (Kelompok Wanita Tani) yang membantu warga masyarakat untuk mendapatkan sayur-sayuran dengan mudah.

b. Integrasi

1. Sosialisasi

Adanya sosialisasi program dari RT dan RW yang bersumber dari pemerintah desa, terdapat beberapa program yang dibuat yakni salah satu contohnya adalah program KWT dan pembuatan karpet dari bahan bekas yang nantinya di distribusikan ke sekolah-sekolah yang terletak di desa Cigondewah Hilir dan terdapat informasi berupa banner tentang program-program tersebut. Selain itu, menurut Ibu Siti Nasriyah karena di setiap RW terdapat wifi gratis maka sangat mudah untuk mengakses internet, dengan sesekali Ibu Nasriyah melihat informasi di website resmi desa Cigondewah Hilir. Dapat disimpulkan dari hasil dari wawancara di atas maka tingkat efektivitas dalam indikator integrasi dengan sub indikator sosialisasi dinilai efektif, karena telah memenuhi kriteria indikator.

2. Konsensus

Setiap penyusunan APBDes dari MUSDUS lalu penyusunan RKP dan RPJM Desa semuanya melibatkan beberapa elemen yang ada di dalam pemerintahan desa dan juga beberapa warga masyarakat yang ikut serta aktif dalam penyusunan RKP dan RPJM Desa serta APBDes melalui kesepakatan bersama, agar seluruh program yang dibuat oleh Pemdes memang sesuai dengan kebutuhan Desa. Dapat disimpulkan dari hasil dari wawancara di atas maka tingkat efektivitas dalam indikator integrasi dengan sub indikator konsensus dinilai efektif, karena telah memenuhi kriteria indikator.

c. Adaptasi

Kesesuaian Program

Adanya Dana Desa yang diprioritaskan salah satunya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, maka program pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan keadaan desa dan warga masyarakat desa. Selain itu program dari pemberdayaan masyarakat harus memiliki nilai manfaat bagi perkembangan desa

serta tingkat perekonomian warga masyarakat, di desa Cigondewah Hilir terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat serta realisasi dari program tersebut.

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Cigondewah Hilir Kecamatan
Margaasih Kabupaten Bandung
Tahun 2019**

No	Sub Bidang	Kegiatan
1	Bidang Pertanian dan Peternakan	Menghasilkan bahan baku tekstil seperti kain dan jaket
2	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Mengadakan <i>Study Banding</i> untuk meningkatkan kualitas aparatur desa
3	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Mengadakan kegiatan Diklat dan BIMTEK bagi masyarakat
4	Bidang Dukungan Penanaman Modal	Ikut serta dalam men- <i>supply</i> dalam usaha masyarakat, seperti produk jaket
5	Bidang Perdagangan dan Penindustrian	Ikut serta dalam berwirausaha

Sumber: Wawancara Kepala Desa Cigondewah Hilir pada tanggal 6 Maret 2020.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program dari pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir sudah sesuai dengan keadaan desa dan masyarakat desa yang rata-rata memiliki home industri.

2. Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Dalam sebuah pengelolaan maka tidak akan pernah terlepas dari kelemahan yang menjadi faktor penghambat dari sebuah pencapaian tujuan, faktor penghambat dari efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yakni, ada 2 faktor: sumber daya manusia dan tingkat pendidikan di desa Cigondewah Hilir. Faktor penghambat dari beberapa pengusaha tidak ada pencatatan sehingga tidak ada data yang menunjukkan hasil dari penghasilan usaha tersebut. Tingkat pendidikan di desa Cigondewah Hilir ternilai rendah, karena banyak orang tua yang tidak

memprioritaskan pendidikan anaknya disebabkan mayoritas warga masyarakat desa Cigondewah Hilir memiliki home industri, dan *mindset* warga masyarakat pun yang ketika sudah bisa mencari uang sendiri, dengan otomatis menyampingkan pendidikan, dan menikah dengan sesame yang memiliki usaha juga.

Kesimpulan

Pengelolaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung sudah efektif. Dapat dilihat dari indikator efektivitas yang digunakan yakni indikator pencapaian tujuan dengan data yang menyatakan bahwa desa Cigondewah Hilir di tahun 2020 sudah termasuk ke dalam kategori Desa Maju selain itu dari sub indikator kurun waktu pelaksanaan APBDes dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dari sub indikator sasaran menyatakan bahwa setiap program pemberdayaan masyarakat sangat mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir sehingga berdampak kepada ketercapaian sasaran Dana Desa dalam mewujudkan desa maju. Sedangkan dalam indikator intergrasi dalam sub indikator sosialisasi sudah memiliki media publikasi dan di sub indikator konsensus dalam menetapkan APBDes melibatkan di antaranya adalah Peldes, LPM, Bumdes, masyarakat melalui pengawasam yang dilakukan oleh BPD.

Selanjutnya indikator Adaptasi yang menyatakan bahwa seluruh program dari pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di desa Cigondewah Hilir adalah sumber daya manusia di bidang pengembangan usaha terutama dalam pencatatan pembukuan. Oleh karena itu, desa harus memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kemampuan usaha terutama dalam bidang pembukuan sehingga usaha masyarakat dapat berkembang sejalan dengan kemampuan dibidang pembukuan. Faktor penghambat berikutnya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu desa harus memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan. Seperti menyediakan kelompok belajar untuk penyetaraan pendidikan.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Allah Swt atas segala limpahan nikmat dan karunianya, seluruh pihak yang telah memberikan nasehat serta bimbingannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Rujukan

Buku

- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Pembaruan Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Moleong, LJ. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Steers, RM. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Supriyadi, EI., Asih, DB. (2019). *Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung)*. Jurnal Rasi Volume 1, No. 2, Hal 61-69). Bandung.
- Suyatno, B. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta : Prenadamedia Group.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan :

- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. 2019. *Permenkeu Nomor 205/PKM.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Keuangan. 2016. *Permenkeu Nomor 49/Pmk.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.
- Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2019. *Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun*.
- Peraturan Pemerintah. 2014. *Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa*.